

narasumber berarti sumberdaya manusia di PT Bio Farma (Persero) merupakan aset penting yang menggerakkan roda perusahaan dengan berbagai skill dan kemampuan pengetahuan yang baik guna keberhasilan tujuan perusahaan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Corporate Communication PT Bio Farma (Persero), yang dimana dengan adanya undang-undang tersebut menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan kegiatan dan program dalam penyebarluasan informasi di PT Bio Farma (Persero). Dan adanya undang-undang yang mengatur keterbukaan informasi publik sangat memudahkan

Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) untuk mengerti informasi yang layak atau tidak layak untuk dipublikasikan agar tetap menjaga citra baik perusahaan. Corporate Communicatio PT Bio Farma (Persero) telah melaksanakan aturan sesuai Undang-Undang yang mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikutserta memberikan pelayanan berupa informasi kegiatan dan usaha perusahaan kepada masyarakat dan pemohon informasi. Dengan media elektronik yang dimanfaatkan dengan baik oleh internal perusahaan menjadikan penyebaran informasi lebih cepat dan mudah. Hal ini juga sejalan dengan keterbukaan informasi publik menurut undang-undang bahwa penyebaran informasi dapat menggunakan bantuan media elektronik atau non-elektronik sesuai kebutuhan perusahaan.

Selanjutnya, adapun beberapa faktor pendukung yang menentukan keberhasilan tujuan visi misi dan pencapaian perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor komunikasi, faktor disposisi, faktor sumber daya, dan faktor struktur birokrasi. Dari seluruh faktor yang telah disebutkan memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik. Disini peneliti akan menyimpulkan semua faktor tersebut sesuai dengan pembahasan yang telah dianalisis di bab sebelumnya sebagai berikut:

6.1.1 Komunikasi

Pengimplementasian keterbukaan informasi publik oleh Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) berdasarkan data dari hasil wawancara dan observasi, peneliti beranggapan bahwa Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) melakukan komunikasi dengan baik dan jelas dengan internal

maupun dengan stakeholder lain yang memiliki kerjasama dengan pihak perusahaan guna keberlangsungan jalannya suatu program. Komunikasi sangat berperan penting guna menciptakan suatu kegiatan dapat dikatakan berjalan baik dari konsistensi dan penyampaian informasi dari komunikasi tersebut. Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) dalam proses komunikasi di internal menggunakan peran media komunikasi seperti Intranet yang hanya bisa diakses oleh karyawan internal perusahaan saja. Adanya peran media komunikasi tersebut, sangat membantu proses penyebaran informasi kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pemanfaatan intranet oleh Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) membantu informasi berjalan efektif dan dapat diterima dengan cepat oleh kedua Dinas. Untuk media elektronik lainnya Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) memanfaatkan teknologi lain seperti website resmi perusahaan ataupun portal BUMN untuk publikasi informasi kegiatan yang sangat memudahkan dan mempercepat informasi diterima oleh masyarakat dan pemohon informasi.

6.1.2 Sumber Daya

Adapun faktor sumberdaya yang sangat penting untuk keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik. Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) sangat memperhatikan sumberdaya manusia yang dimiliki dengan memberikan pembekalan kemampuan dan keterampilan karena PT Bio Farma (Persero) percaya bahwa aset penting perusahaan terletak pada sumber daya manusia yang berkompeten dan terampil. Dengan memaksimalkan kegiatan

yang dilakukannya, jumlah staf sebanyak 24 karyawan tersebut membuat Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) tidak memiliki kendala atau hambatan dalam kinerjanya karena individu yang ada memang individu pilihan yang ditetapkan untuk menjalankan keterbukaan informasi publik yang memang sesuai dengan bidang dan keahliannya. Karena staf yang menjalankan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan individu yang berdedikasi dalam bekerja. Ini menjadikan sumberdaya manusia yang dimiliki PT Bio Farma (Persero) merupakan kapabel dan kompeten dalam implelementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Kemudian tidak hanya sumber daya manusia, namun adanya sarana dan prasarana dan ketersediaan finansial juga mendukung jalannya implementasi kebijakan publik. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari fasilitas yang diberikan perusahaan yang sangat layak dan memadai dilingkungan perusahaan karena PT Bio Farma (Persero) meyakini bahwa kesuksesan berjalannya kinerja juga dipengaruhi oleh fasilitas pendukung. Seperti ketersediaan ruang kerja yang layak, komputer, fasilitas transportasi untuk urusan perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya ketersediaan sumber daya finansial yang ada dalam setiap kegiatan sudah menjadi suatu kewajiban dari PT Bio Farma (Persero) untuk secara konsisten menyediakan anggaran yang sesuai kebutuhan dan dianggarkan untuk setiap kegiatan internal maupun eksternal perusahaan yang melibatkan pihak mitra perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya hambatan.

6.1.3 Disposisi

Adanya faktor disposisi sangat mendukung jalannya implementasi kebijakan. Dimana faktor disposisi menentukan wewenang dan tanggungjawab yang akan diberikan kepada setiap unit/divisi sesuai dengan beban tugas pokok dan fungsinya. Disposisi Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) berada dibawah pengawasan Sekretaris Perusahaan dimana dalam pelaksanaan tupoksi harus mendapat persetujuan dari Sekretaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) karena informasi tersebut menyangkut citra baik perusahaan. Tak terkecuali pada pelimpahan wewenang kepada mitra perusahaan dalam menjalankan kerjasama dengan *stakeholders* lain jadi lebih terstruktur dengan adanya alur pembagian pekerjaan dan tugas secara detail dilakukan. Ini dibuktikan dengan minimnya kendala penyebaran informasi dan tugas pokok kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang pada akhirnya menjadikan proses implelementasi kebijakan berjalan dengan baik.

Di Corporate Communication adanya disposisi ini memperjelas dan membantu pembagian tugas pokok dan wewenang kepada tiap-tiap seksi yang ada di internal Corporate Communication PT Bio Farma (Persero). Dan untuk menentukan Standart Operasional Prosedur (SOP) Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik sebagai dasar penyebarluasan informasi yang dimaksud untuk menyesuaikan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik. Namun dalam proses pembuatannya tidak banyak melibatkan Corporate Communicaition PT Bio Farma (Persero). Sehingga Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) tidak benar-benar terlibat hanya sebagai actor pelaksana kebijakan.

6.1.4 Struktur Organisasi

Hasil Analisis dari struktur birokrasi juga mendukung jalannya keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik oleh Corporate Communication PT Bio Farma (Persero). Karena jenjang hierarki dan penyebaran wewenang di Corporate Communication jadi lebih terstruktur dan jelas. Adanya jenjang hierarki juga memudahkan sekretaris dan direksi melakukan pengawasan terhadap kinerja corporate communication untuk terus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Jadi proses penyebarluasan informasi jadi lebih terkendali karena adanya pengawasan tersebut. Kemudian dengan adanya struktur birokrasi penyebaran wewenang dan telah diamanatkan kepada tiap unit/divisi bisa dilakukan dengan terorganisir dan terarah semua porsi dan beban tugas yang dilimpahkan.

6.2 Saran

Menurut peneliti dari analisis diseluruh indikator yang telah dijabarkan di bab sebelumnya, peneliti memberikan saran untuk terus meningkatkan dan mempertakankan segala kegiatan dan kinerja baik yang menjadi keunggulan Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) ataupun perusahaan sendiri. Karena sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bio Farma pastinya mempunyai strategi tersendiri untuk mengembangkan kegiatan dan usahanya kearah yang lebih baik ditahun-tahun mendatang. Peneliti juga menyarankan untuk tetap mempertahankan strategi komunikasi internal dilingkup perusahaan karena penyebaran informasi di area perusahaan bisa dilakukan dengan sangat

cepat karena melibatkan banyak media elektronik dan non-elektronik yang menjadikan setiap karyawan di PT Bio Farma (Persero) mengetahui informasi terbaru seputar perusahaan atau diluar perusahaan dengan adanya media komunikasi seperti intranet atau e-bulletin milik perusahaan. Peneliti juga memberikan saran untuk tetap selalu menjalankan SOP perusahaan dan dalam perancangan SOP perlu melibatkan Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) dalam proses penyusunannya supaya internal perusahaan bisa lebih mengetahui secara pasti prosedur yang harus atau tidak harus diketahui. Adapun saran yang perlu untuk dikembangkan dan tingkatkan dari mulai indikator **Komunikasi** adalah untuk lebih memperkuat koneksi dengan organisasi yang dilibatkan dalam keterkaitan kerjasama program imunisasi, dengan membangun koneksi yang baik karyawan akan dengan mudah menciptakan komunikasi yang efektif dengan organisasi lain. Selanjutnya indikator **Sumberdaya** adalah dengan meningkatkan pelatihan pengembangan skill dan pengembangan pendidikan untuk karyawan yang berstatus tetap. Dengan begitu kualitas dari karyawan akan membantu PT Bio Farma (Persero) lebih maju dan membantu mencapai tujuan. Kemudian ada indikator **Disposisi** adalah dengan lebih melibatkan karyawan dalam pembentukan Standar Operasional Prosedure (SOP) sebagai upaya proses kerja agar selaras dan efisien di lingkungan Corporate Communication. Terakhir ada **Struktur Birokrasi** adalah untuk terus meningkatkan pengawasan dalam penyebaran informasi dengan begitu seluruh informasi terkait perusahaan yang nantinya akan dipublikasikan bisa dipertanggungjawabkan oleh internal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, L. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.

Arifin, A. *Persoalan Manusia Dalam Manajemen*. Jakarta: LAN.

Azis, R-Y. *Peran Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik, 2018.

- Dwight, W. *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration 1st Edition*. Osmania University: The Ronald Press Company, 1948.
- Edward III, G-C. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press, 1980, dikutip dari R-E. Putera, dan T-R. Valentina. 'Implementasi Program e-KTP di Daerah Percontohan,' *Mimbar*, 27. 2011.
- Edwards, G-C. dan Sharkansky, I. *The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy*. New York: W. H. Freeman, 1978.
- Grindle, M-S. *Politics and Policy Implementation in the third World*. New Jersey: Princeton University Press, 1980, dikutip dari R-E. Putera, dan T-R. Valentina. 'Implementasi Program e-KTP di Daerah Percontohan,' *Mimbar*, 27. 2011.
- Kosim, E. *Metode Sejarah Asan dan Proses*. Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjajaran, 1988.
- Krippendorff, K. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologis*. Jakarta: CV Rajawali, 1991.
- Lutfi, M. dan Satriawan, I. *Meneropong Komisi Informasi Publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Marshall, D-E. *Public Administration*. University of Michigan: Rinehart, 1953.
- Mazmanian, D-A. dan Sabatier, P-A. *Implementation and Public Policy*. New Jersey: Foresman and Company, 1983, dikutip dari R-E. Putera, dan T-R. Valentina. 'Implementasi Program e-KTP di Daerah Percontohan,' *Mimbar*, 27. 2011.
- Meter, D-S. dan Horn, C-E. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Washington: Congressional Quarterly Press, 1975, dikutip dari R-E. Putera, dan T-R. Valentina. 'Implementasi Program e-KTP di Daerah Percontohan,' *Mimbar*, 27. 2011.

Moleong, L-J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Moleong, L-J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2005.

Prajudi, A. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Ramesh, M. dan Howlett, M. *Studying Public Policy: Policy Cycle and Policy Subsystem*. Toronto: Oxford University Press, 1955.

Samodra, W. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, dikutip dari R-E. Putera, dan T-R. Valentina. 'Implementasi Program e-KTP di Daerah Percontohan,' *Mimbar*, 27. 2011.

Semiawan, C-R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Silalahi, U. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press, 2006.

Subasono, A-G. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Wahab, S-A. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997, dikutip dari R-E. Putera, dan T-R. Valentina. 'Implementasi Program e-KTP di Daerah Percontohan,' *Mimbar*, 27. 2011.

Dokumen Resmi Pemerintah:

Peraturan Walikota Nomor 1380 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kelola Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jurnal:

Edward, H-L. 'Administrative Science Quarterly,' *Notes on a General Theory of Administration*, 1. 1956.

Media Elektronik:

Annual Report. 'Mengintip Peran Corporate Communication dalam Mengawal Citra Perusahaan.' Available from <http://annualreport.id/kiat-strategi/mengintip-peran-corporate-communication-dalam-mengawal-citra-perusahaan> (10.4.18).

Biofarma. 'Fokus Bisnis Kami.' Available from <http://www.biofarma.co.id/id/our-focus-2/> (12.1.20).

BUMN, 'Badan Usaha Milik Negara.' Available from <http://bumn.go.id/> (21.12.16).

Dey, D. '8 Contoh Komunikasi Eksternal dalam Organisasi.' Available from <https://pakarkomunikasi.com/8-contoh-komunikasi-eksternal-dalam-organisasi> (10.5.20).

Dinas Kesehatan Kota Bandung. 'Sejarah Dinas Kesehatan Kota Bandung.' Available from <https://dinkes.bandung.go.id/dashboard.php?page=sejarah> (10.2.20).

Dinas Kesehatan Kota Bandung. 'Tugas Pokok Dinas Kesehatan.' Available from <https://dinkes.bandung.go.id/dashboard.php?page=profil-kepala-sekolah> (10.2.20).

Dinas Kesehatan Kota Bandung. 'Visi-Misi Dinas Kesehatan Kota Bandung.' Available from <https://dinkes.bandung.go.id/dashboard.php?page=visi-misi> (10.2.20).

Dinas Pendidikan Kota Bandung. 'Visi dan Misi.' Available from <https://disdik.bandung.go.id/ver3/visi-dan-misi/> (10.2.20).

Dosen Pendidikan. 'Pengertian Analisis Isi.' Available from <https://www.dosenpendidikan.co.id/analisis-isi/> (12.4.20).

Maxmanroe. 'Pengertian Komunikasi: Definisi, Tujuan, Fungsi, Jenis, dan Komponennya.' Available from <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-komunikasi.html> (10.5.20).

Pakar Komunikasi. 'Komunikasi Internal – Pengertian – Ruang Lingkup.' Available from <https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-internal> (10.5.20).

Pelayanan Publik. 'Apa Itu Birokrasi? Pengertian, Tujuan, Ciri.' Available from <https://pelayananpublik.id/2020/02/03/apa-itu-birokrasi-pengertian-tujuan-ciri/> (25.5.20).

Riadi, M. 'Sejarah, Tujuan dan Tahapan Analisis Isi.' Available from <https://www.kajianpustaka.com/2016/10/sejarah-tujuan-dan-tahapan-analisis-isi.html> (12.2.20).

Welkinson, D. 'Peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam Upaya Implementasi UU No. 14 Tahun 2008.' Available from <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/129255-T%2026794-Analisis%20implementasi-Literatur.pdf> (1.4.18).